

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Akuntansi pemerintah adalah salah satu bidang akuntansi yang berkaitan dengan lembaga pemerintahan. Dalam setiap kegiatan pemerintahan, baik itu pemerintah kecil, menengah, maupun pemerintah besar, perlu sekali adanya suatu prosedur yang baik dalam menjalankan setiap kegiatannya. Kegiatan yang dilakukan oleh pemerintahan akan dapat dilakukan secara lancar dan tersusun rapi apabila dalam pemerintahan tersebut tercipta suatu sistem yang baik, efektif, dan efisien, yang dapat membantu dalam pelaksanaan, pengawasan, ataupun dalam tiap aktivitas pemerintahan tersebut. Pelaksanaan suatu sistem yang baik ini akan mencerminkan kokohnya suatu pemerintahan (Muliadi, 2015).

Menurut PSAP No 01 tentang penyajian Laporan Keuangan paragraf 8 mendefinisikan kas sebagai uang tunai dan juga saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan di pemerintahan. Menurut Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) No 14 tentang akuntansi kas, kas adalah aset pemerintah paling lancar dan aktif. Sifat lancar kas ditunjukkan dengan kemudahan untuk di ubah menjadi aset lain sesuai kebutuhan, sebagai alat pembayaran atau untuk memenuhi kewajiban dari pemerintah. Kas disebut

sebagai aset lancar paling aktif karena semua transaksi yang dilakukan pemerintah berhubungan dengan penerimaan kas dan juga pengeluaran kas.

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Lampung Tengah sebagai konteks pelayanan publik dalam rangka penyelenggaraan tata pemerintah yang baik. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah tugas utamanya yaitu mengelola keuangan. Penerimaan pendapatan asli daerah diperoleh antara lain dari transaksi: pajak daerah, retribusi daerah dan penerimaan lain-lain.

Penerimaan kas merupakan komponen sumber daya yang sangat penting didalam melaksanakan program pembangunan yang telah direncanakan oleh pemerintah. Kas diakui sebesar nilai nominal dari uang tunai atau yang dapat dipersamakan dengan uang tunai, serta rekening giro dibank yang tidak dibatasi penggunaannya. Perubahan kas dipengaruhi oleh 2 aktivitas yaitu: penerimaan kas dan pengeluaran kas. Penerimaan kas meliputi transaksi – transaksi yang mengakibatkan bertambahnya saldo kas tunai dan atau rekening bank milik entitas pemerintah daerah, baik yang berasal dari pendapatan tunai, penerimaan piutang, penerimaan transfer, penerimaan pinjaman, maupun penerimaan lainnya (Muliadi, 2015).

Sistem penerimaan kas yang baik dapat mengkoordinasi aktivitas-aktivitas agar dapat berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Untuk melaksanakan prosedur yang baik salah satu cara yang ditempuh adalah

penyusunan sistem penerimaan kas berdasarkan mekanisme yang berlaku. Oleh karena itu, laporan praktik kerja lapangan ini mengangkat topik bagaimana prosedur penerimaan kas yang dilakukan di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lampung Tengah. Sehingga judul yang di ambil yaitu “Prosedur Penerimaan Kas pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Lampung Tengah”.

1.2 Tujuan Praktik Kerja Lapangan

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka tujuan dari Praktik Kerja Lapangan (PKL) adalah sebagai berikut:

1. Sebagai wadah untuk menerapkan ilmu yang telah diberikan selama perkuliahan
2. Sebagai wadah untuk mengetahui gambaran dunia kerja secara langsung.
3. Sebagai wadah untuk mengetahui bagaimana sistem penerimaan kas pada BPKAD Lampung Tengah.

1.3 Manfaat Praktik Kerja Lapangan

Manfaat yang dapat diperoleh oleh beberapa pihak dari kegiatan Praktik Kerja Lapangan ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Mahasiswa
 - a. Memperoleh wawasan yang lebih luas dan pengetahuan yang mendalam di bidang akuntansi pemerintahan.

- b. Memperoleh gambaran secara nyata tentang penerapan SAP (Standar Akuntansi Pemerintahan) dan pengalaman kerja secara langsung.
- c. Dapat mengukur kemampuan dalam mengaplikasikan ilmu yang diperoleh dari Universitas Ma Chung di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Lampung Tengah.
- d. Memperoleh wawasan mengenai penerimaan kas di BPKAD Lampung Tengah.

2. Bagi Universitas

- a. Mendapatkan gambaran kebutuhan dunia kerja dari mahasiswa selama pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan berlangsung sehingga mampu meningkatkan kualitas pengajaran
- b. Memperluas jaringan kerja sama dengan berbagai instansi.

3. Bagi Instansi

- a. Mengetahui kemampuan dan kualitas mahasiswa dalam menguasai materi perkuliahan.
- b. Membina hubungan Kerjasama yang baik dengan pihak universitas.
- c. Mendapat bantuan kerja dari para mahasiswa selama proses praktik kerja lapangan berlangsung.